

## JURNALISME BERPERSPEKTIF GENDER

Sarah Santi

FIKOM - Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta  
Jl. Arjuna Utara Tol Tomang, Kebun Jeruk, Jakarta 11510  
sarah.santi@indonusa.ac.id

### ABSTRAK

Persoalan perempuan di media massa menyangkut tiga hal, yaitu gambaran atau representasi wajah perempuan yang tidak menyenangkan, keterlibatan perempuan dalam struktur organisasi media yang belum berimbang dibandingkan dengan laki-laki, dan isi pemberitaan yang tidak sensitif dengan persoalan-persoalan perempuan. Untuk itu, diperlukan jurnalisme yang berpihak pada perempuan, yang dikenal dengan jurnalisme berperspektif gender.

**Kata Kunci:** Media, jurnalisme berperspektif gender, partisipasi, representasi, dan akses perempuan terhadap media massa.

### Pendahuluan

Berbicara soal perempuan dan media massa, pada dasarnya kita berbicara tentang tiga hal. Pertama adalah representasi perempuan dalam media massa, baik media cetak, media elektronik, maupun berbagai bentuk multi media. Sejauh ini media massa masih menjadikan perempuan sebagai obyek, baik di dalam pemberitaan, iklan komersial maupun program acara hiburannya seperti sinetron. Wajah perempuan dalam pemberitaan cenderung menggambarkan perempuan sebagai korban, pihak yang lemah, tak berdaya, atau menjadi korban kriminalitas karena sikapnya yang “mengundang” atau memancing terjadinya kriminalitas, atau sebagai obyek seksual. Sementara perempuan dalam iklan tampil lebih sering sebagai potongan-potongan tubuh yang dikomersialisasi karena keindahan tubuhnya atau kecantikan wajahnya. Wajah perempuan dalam program acara hiburan seperti sinetron juga menyudutkan perempuan. Penggambaran dalam cerita-ceritanya seringkali sangat stereotipe. Perempuan digambarkan tak berdaya, lemah, membutuhkan perlindungan, korban kekerasan dalam rumah tangga, kompetensinya pada wilayah domestik saja. Atau, justru perempuan yang galak, tidak masuk akal, “murahan” dan bahkan pelacur, bukan perempuan baik-baik, pemboros, dan sebagainya.

Kedua, persoalan perempuan justru terletak pada masih sedikitnya perempuan yang terlibat dalam kerja jurnalistik karena memang

selama ini kerja jurnalistik dianggap sebagai wilayah kaum pria. Meski demikian, dari tahun ke tahun jumlah perempuan yang berprofesi sebagai jurnalis meningkat. Di negara-negara maju, komposisi jurnalis perempuan mencapai 30% - 40% (Jurnal Perempuan, 2003). Sementara, dalam tulisan Bettina Peters yang dikutip oleh Jurnal Perempuan (2003) menguraikan bahwa *International Federation for Journalist* (IFJ) pernah melakukan penelitian di 39 negara dan mendapatkan data bahwa prosentase rata-rata dari jurnalis perempuan adalah 38%. Di Indonesia, berdasarkan data Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, diperkirakan dari 100.00 jurnalis yang ada, 17% nya dalam perempuan (Venny, 2005).

Meski demikian peningkatan ini perlu dicermati karena keterlibatan para perempuan dalam dunia jurnalistik dan media tidak berarti mereka juga punya kontribusi besar dalam menentukan isu-isu yang harus diangkat dengan sudut pandang para perempuan. Ternyata, jumlah perempuan yang duduk dalam struktur media di tingkat pengambil keputusan tetap masih terbatas. Prosentase perempuan sebagai editor, kepala bidang atau departemen, dan pemilik media hanya berkisar 0,6% saja (Venny, 2005). Keterbatasan ini membawa kita pada persoalan ketiga ketika bicara tentang perempuan dan media massa.

Hal ketiga itu adalah persoalan sejauh mana para pengambil keputusan dalam media massa memiliki sensitivitas gender dalam menentukan isu pemberitaan. Hal ini terkait dengan

kepentingan kekuasaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Sayangnya, karena tidak memiliki perspektif gender, media massa seringkali abai pada isu-isu perempuan dan persoalan gender. Pada akhirnya, representasi perempuan yang ditampilkan dalam media massa semakin memarjinalkan dan mensubordinasi para perempuan.

Ketiga permasalahan di atas membawa kita lebih jauh pada satu pertanyaan: apakah kerja dan hasil kerja jurnalisme harus bebas nilai? Atau justru harus berpihak pada perempuan?

### **Jurnalisme dan Perspektif Gender**

Para feminis meyakini bahwa media harus berperan dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan gender. Karenanya, sebenarnya diperlukan jurnalisme yang memiliki sudut pandang perempuan, yang dikenal dengan istilah jurnalisme berperspektif gender. Nur Iman Subono mencoba mendefinisikan jurnalisme berperspektif gender dengan mengatakan bahwa itu merupakan: "...kegiatan atau praktek jurnalistik yang selalu menginformasikan atau bahkan memperlmasalahkan dan menggugat terus menerus, baik dalam media cetak (seperti dalam majalah, surat kabar, dan tabloid) maupun media elektronik (seperti dalam televisi dan radio) adanya hubungan yang tidak setara atau ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, keyakinan jender yang menyudutkan perempuan atau representasi perempuan yang sangat bias jender" (Subono, 2003).

Dengan mengutip May Lan, Subono pun masih mencoba menambahkan pemahaman tentang jurnalisme berperspektif gender. Yaitu praktik jurnalisme yang berupaya untuk menyebarkan ide-ide mengenai kesetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan melalui media.

Dalam tulisannya, Subono berusaha lebih jauh mencoba menunjukkan dua pendekatan kerja jurnalisme, yaitu jurnalisme yang memiliki sensitivitas gender dan jurnalisme yang tidak memiliki sensitivitas gender atau yang disebut sebagai jurnalisme netral gender. Ia memodifikasi sebuah model dari bukunya Eriyanto dimana model tersebut menyebutkan 4 tolok ukur untuk melihat apakah sebuah media melakukan kerja jurnalistik yang netral gender atau berperspektif

gender, yang dapat dilihat dalam Tabel 1. Keempat hal yang dapat dijadikan acuan itu adalah bagaimana media melihat fakta, bagaimana media itu sendiri berusaha memosisikan dirinya diantara berbagai kelompok kepentingan dan akses atas media, bagaimana jurnalis media itu sendiri mengambil posisi dan perannya dalam kerja di media, dan terakhir adalah bagaimana ketiga acuan pertama di atas menjadi dasar mengolah hasil peliputan dan tampil dalam pemberitaan. Jika media massa itu memiliki keberpihakan, maka tampilan hasil peliputan atau pemberitaan memang secara tegas memiliki perspektif tersendiri, sementara jika netral gender, maka isi pemberitaan tidak memiliki sudut pandang atau perspektif tertentu atas sebuah persoalan yang memihak kepada perempuan.

### **Representasi, Partisipasi, dan Akses Perempuan dalam Media**

Persoalan representasi perempuan di media, pemberitaan yang memiliki sensitivitas gender, dan jurnalisme yang memiliki keberpihakan seperti yang terurai di atas pada dasarnya bermuara pada sejauh mana akses perempuan pada media massa. Hal itu masih menjadi persoalan tersendiri.

Konferensi Tingkat Dunia tentang Perempuan IV di Beijing, China pada tahun 1995 berhasil merumuskan rekomendasi 12 bidang kritis sebagai sasaran-sasaran strategis yang harus dipenuhi Negara. Isi dari rekomendasi yang disebut dengan Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi (*Beijing Platform for Action*) itu antara lain adalah mencapai sasaran strategis bagi perempuan di media massa. Ada dua sasaran strategis menyangkut perempuan dan media massa, yaitu :

- a. meningkatkan partisipasi dan kesempatan perempuan untuk berekspresi dan mengambil keputusan di dalam dan melalui media massa serta teknologi-teknologi komunikasi yang baru
- b. memajukan gambaran-gambaran yang seimbang dan tidak klise tentang perempuan dalam media. (Lembar Info Edisi 25, <http://www/lbh-apik.or.id/fac-25.tm>, diakses 31 Oktober 2006)

Perempuan dan media massa menjadi salah satu dari 12 bidang sasaran strategis BPFA+10 itu dikarenakan pada kenyataannya identitas dan representasi perempuan di media massa masih menunjukkan kuatnya stereotipe terhadap perempuan akibat budaya patriarkhal selain juga perempuan sebagai obyek di media massa. Di sisi lain, media massa memang memiliki peranan yang besar dalam mengkonstruksi masyarakat sehingga gambaran tentang perempuan yang muncul di media jika tidak dikritisi akan dianggap natural, wajar, dan bahkan begitulah adanya.

Padahal, jika saja akses perempuan terhadap media tidak terbatas, banyak yang bisa dilakukan oleh mereka yang kritis terhadap identitas dan representasi perempuan dalam media. Keterbatasan akses itu membuat perempuan menjadi terpinggirkan. Wajah perempuan yang sesungguhnya tidak tampak dan suara perempuan tidak terdengar karena terhegemoni oleh kekuasaan dan kepentingan ekonomi yang berbalut nilai-nilai patriarkhal.

**Tabel 1**  
**Perbandingan Skema Jurnalisme Netral Jender dan Jurnalisme Berperspektif Jender**

<b>Jurnalisme “Netral/Obyektif” Gender</b>	<b>Jurnalisme Berperspektif Jender</b>
<b>FAK</b>	<b>TA</b>
Terdapat fakta yang nyata dan ini diatur oleh hukum-hukum/kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal	Fakta yang ada pada dasarnya merupakan hasil dari ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, dan ini berkaitan dengan dominasi kekuatan ekonomi-politik dan sosial-budaya yang ada dalam masyarakat
Berita adalah refleksi dari realitas sosial yang ada. Karenanya, berita harus bisa mencerminkan realitas yang diberitakan	Berita yang terbentuk merupakan refleksi dari kepentingan kekuatan dominan yang telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender
<b>Jurnalisme “Netral/Obyektif” Jender</b>	<b>Jurnalisme Berperspektif Jender</b>
<b>POSISI</b>	<b>MEDIA</b>
Media adalah sarana di mana semua anggota masyarakat dapat berkomunikasi dan berdiskusi dengan bebas, netral, dan setara	Mengingat media umumnya hanya dikuasai kepentingan dominan (baca: patriarki), maka media seharusnya menjadi sarana untuk membebaskan dan memberdayakan kelompok-kelompok yang marjinal (khususnya perempuan)
Media adalah sarana yang menampilkan semua pembicaraan dan kejadian yang ada dalam masyarakat secara apa adanya	Media adalah alat yang harus dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok marjinal (terutama perempuan) untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender
<b>Jurnalisme “Netral/Obyektif” Jender</b>	<b>Jurnalisme Berperspektif Jender</b>
<b>POSISI</b>	<b>JURNALIS</b>
Nilai atau ideologi jurnalis berada di “luar” proses peliputan atau pelaporan berita/ peristiwa	Nilai atau ideologi jrnalis tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan atau pelaporan berita/peristiwa
Jurnalis memiliki peran sebagai pelapor yang non-partisan dari kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat	Jurnalis memiliki peran sebagai aktivis atau partisan dari kelompok-kelompok marjinal (khususnya perempuan) yang ada dalam masyarakat
Landasan moral (etis)	Landasan ideologis
Profesionalisme sebagai keuntungan	Profesionalisme sebagaia kontrol
Tujuan peliputan dan penulisan: pemaparan dan penjelasan apa adanya	Tujuan peliputan dan penulisan: pemihakan dan pemberdayaan kepada kelompok-kelompok marjinal, terutama perempuan
Jurnalis sebagai bagian dari tim untuk mencari kebenaran	Jurnalis sebagai pekerja yang memiliki posisi berbeda dalam kelas-kelas sosial
<b>Jurnalisme “Netral/Obyektif” Jender</b>	<b>Jurnalisme Berperspektif Jender</b>
<b>HASIL PELIPUTAN</b>	<b>/ PEMBERITAAN</b>
Hasil liputan bersifat dua sisi atau dua pihak (seimbang) – gender netral	Hasil liputan merefleksikan ideologi jurnalis yang berperspektif gender
“Obyektif” – netral, tidak memasukkan opini atau pandangan subyektif	“Subyektif” karena merupakan bagian dari kelompok-kelompok marjinal yang diperjuangkan
Memakai bahasa “baku” yang tidak menimbulkan banyak penafsiran	Memakai bahasa yang sensitif gender dengan pemihakan yang jelas
Hasil peliputan bersifat eksplanasi, prediksi, dan kontrol	Hasil peliputan bersifat kritis, transformatif, emansipatif dan pemberdayaan sosial

Sumber: Subono (2003; 61-64).

Sebuah organisasi non-pemerintah yaitu Indonesian NGO Forum on BPFA+10 mengidentifikasi hambatan-hambatan perempuan dalam media massa didalam laporan mereka tentang pelaksanaan BPFA+10 itu. Hambatan-hambatan itu adalah sebagai berikut (Achmad, 2005).

**Pertama**, citra perempuan yang tampil dalam iklan-iklan masih seputar kegiatan domestik dan kecantikan. **Kedua**, program acara televisi juga memberi kontribusi negatif terhadap citra perempuan. Perempuan jarang digambarkan sebagai sosok yang independen, berani dan terpelajar dalam sinetron-sinetron televisi. **Ketiga**, hanya sedikit program acara TV dan radio yang memberdayakan perempuan. Walaupun perempuan tampil dalam program acara TV dan radio, lebih mengarah pada kegiatan masak-memasak atau *personal grooming*. **Keempat**, media memperlakukan perempuan lebih sebagai obyek yang dieksploitasi, sehingga tubuh perempuan tampil dalam iklan-iklan yang tidak ada hubungannya dengan produk yang diiklankan. Begitu juga pemberitaan-pemberitaan yang tidak sensitif terhadap gender. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan yang besar dalam hal pemahaman dan kesadaran gender. **Kelima**, bahasa pun kemudian mengkonstruksi stereotipe citra perempuan di media. Yang terjadi kemudian adalah kerja jurnalistik, melalui bahasa dan pilihan katanya, menampilkan berita-berita kriminalitas yang membuat perempuan menjadi korban berkali-kali dan bukannya memberitakan adanya pelanggaran hak terhadap perempuan. **Keenam**, tidak adanya program khusus dari pemerintah untuk memperkenalkan dan mempromosikan konsep-konsep kesetaraan dan keadilan gender di media massa. **Ketujuh**, pemerintah masih belum bisa merevisi sumber hukum yang sangat bias gender yaitu UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Isi undang-undang itu sangat bertentangan dengan CEDAW yang merupakan sebuah konvensi internasional untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. **Kedelapan**, perempuan tidak bisa menggunakan pengaruhnya dalam menentukan isi media dan kebijakan-kebijakannya dikarenakan hanya sedikit perempuan yang berada dalam posisi pengambil keputusan di media.

## Kesimpulan

Berangkat dari argumentasi-argumentasi di ataslah kemudian menjadi sangat bisa diterima jika perempuan perlu memanfaatkan media massa untuk memperdengarkan suara dan pengalamannya dan sekaligus menampilkan wajah perempuan yang lebih representatif.

Mengapa media massa menjadi sebuah sasaran strategis bagi alat untuk menyuarakan identitas, keterwakilan dan kepentingan perempuan? Hal ini dikarenakan karakter dan peran media massa yang khas. Dalam tulisannya, Adriana Venny mengatakan bahwa sejalan dengan perannya sebagai media sumber informasi, pendidikan, dan hiburan, media massa juga memainkan peranan penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi (2005). Ia mencontohkan keberhasilan program pemerintah masa Orde Baru yang membentuk “Kelompok Pencapir” (Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa) ketika mensosialisasikan program-program pertaniannya.

Organisasi-organisasi non-pemerintah (ornop-ornop) yang memperjuangkan hak perempuan menyadari bahwa mereka harus memiliki media sendiri untuk menyebarkan gagasan tentang kesetaraan dan keadilan gender. Media juga mereka perlukan untuk melakukan advokasi terhadap kebijakan-kebijakan dan menggalang kesatuan untuk melakukan perubahan. Venny (2005) mencatatkan beberapa ornop perempuan yang memiliki media sendiri untuk tujuan-tujuan meningkatkan partisipasi dan akses perempuan melalui media dan teknologi komunikasi. Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) menggunakan media cetak berupa jurnal, *website*, dan radio dengan memproduksi program acara radio yang memuat isu-isu perempuan dan disiarkan oleh 167 stasiun radio. Selain itu YJP juga membuat film dokumenter tentang perempuan di wilayah konflik dan perdagangan perempuan. Selain itu, banyak ornop-ornop perempuan yang memiliki dan menggunakan media *newsletter* sendiri untuk menyebarkan kesadaran dan isu-isu gender.

Meski ornop-ornop perempuan itu telah begitu baik memanfaatkan industri media untuk menjalankan peran mereka, Venny memberikan catatan pula bahwa nyaris tidak ada dukungan dari pemerintah, industri iklan dan para pembuat kebijakan dalam industri media atas apa yang mereka lakukan. Tidak heran jika upaya *gender*

*mainstreaming* atau pengarusutamaan gender masih memiliki kendala hingga kini. Karenanya, diperlukan sebuah media alternatif yang luas jangkauannya dan mampu membawa pada perubahan.

Venny, Adriana, Dalam Titi Sumbung (Ed.), *"NGO report on the implementation of beijing platform for action 1995 – 2005: Country Indonesia"*, Indonesian NGO Forum on BPFA + 10, Jakarta, 2005.

## **Daftar Pustaka**

Amiruddin, Mariana, (Ed), "Mendengarkan perempuan", Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2004.

Andy, Yetriani, dan Lisa Bona (Ed.), "Diskusi radio jurnal perempuan: suara demokrasi, budaya, dan hak-hak perempuan", Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 1999.

Eriyanto, "Analisis framing: konstruksi, ideologi, dan politik media", *LkiS*, Yogyakarta, 2002.

<http://www.lbh-apik.or.id/fac-25.htm>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2006.

Irigaray, Luce, "Aku, kamu, kita: belajar berbeda", Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2005.

Jurnal Perempuan, "*Perempuan dan media*", No. 28, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2003.

Kusumaningrum, Ade, "Radio, media alternatif suara perempuan?", Dalam *Jurnal perempuan*. No. 28, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2003.

Leclerc, Annie, "Kalau perempuan angkat bicara", Kanisius, Yogyakarta, 2000.

Santi, Budie, (Ed), "Perempuan bertutur: Sebuah Wacana Keadilan Gender dalam Radio Jurnal Perempuan", Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2003.